



**PEMERINTAH KOTA
BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022

Jl. Perwira No. 33 Bukittinggi, Telepon 0752-626633 Kode Pos 26136

website :

dpmpstptk.bukittinggikota.go.id
mpp.bukittinggikota.go.id/

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustriandan Tenaga Kerja (DPMPTSPPTK) Kota Bukittinggi merupakan perwujudan tanggung jawab atas kinerja pencapaian sasaran strategis pada tahun 2022.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2022 pada DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi dapat dilihat dari tingkat capaian indikator kinerja yang dikategorikan sangat tinggi, hal ini tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus dan berkelanjutan. Keterpaduan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi koordinasi yang efektif dan efisien. Namun disadari masih terdapat indikator kinerja yang belum tercapai.

Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik guna mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang. LKJIP DPMPTSPPTK 2022 diharapkan menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Bukittinggi, Januari 2023
Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota
Bukittinggi



Drs. NOVERDI

NIP. 19661116 198602 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF **EXECUTIVE SUMMERY**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja (LKJIP DPMPTSPPTK) merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKJIP DPMPTSPPTK merupakan bagian dari implementasi Sistem Kinerja Instansi Pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan tata pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Penyusunan LKJIP DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2022 memberikan informasi yang terukur atas capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam target sasaran pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKJIP juga memuat capaian realisasi keuangan dan kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di bidang penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian dan tenaga kerja pada Tahun 2022. Serta memuat mengenai analisa penyebab keberhasilan/kegagalan kegiatan atau program, analisa efisiensi penggunaan sumber daya dan analisa program/kegiatan yang menunjang pencapaian Perjanjian Kinerja.

Capaian kinerja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2022 dapat dilihat dengan membandingkan target indikator kinerja sasaran strategis dengan realisasi indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sebagai berikut: (1). Meningkatnya kewirausahaan dan keberdayaan Industri kecil menengah dengan indikator kinerja Pengeluaran perkapita yang ditargetkan 13.721,86 ribu dengan realisasi 13,633,00 ribu dan Tingkat kontribusi sektor industri pengolahan yang ditargetkan 5,24% terealisasi 5,12% (2) Terbangunnya iklim investasi hijau yang kondusif dengan indikator Persentase realisasi investasi hijau dengan target 60% dan terealisasi 20,14%, PMTB ditargetkan 3,80 % terealisasi 1,47%, indeks kemudahan berusaha ditargetkan 70 terealisasi dengan indeks 72,17, (3) Meningkatnya daya saing Angkatan kerja, dengan indikator Tingkat Pengangguran terbuka yang

ditargetkan 6,02% dan terealisasi 6,09%, tingkat partisipasi Angkatan kerja ditargetkan 70,01% terealisasi 67,42% (4) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dengan indikator Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dengan target 90,01 dan terealisasi 95,15%.

Pada Tahun 2022 DPMPTSPPTK juga melaksanakan penerimaan Pendapatan Retribusi pemanfaatan kekayaan daerah dan retribusi IMB yang sah sebesar Rp. 249.745.545,- (99,90%) dari target sebesar Rp. 250.000.000,- dan Belanja Tidak Langsung dengan anggaran Rp. 6.766.531.902,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.361.384.962,- (94,01%) serta Belanja Langsung dengan anggaran sebesar Rp. 6.361.425.691,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.583.822.249,- (87,78%). Secara keseluruhan total Belanja yaitu Rp. 13.127.957.593,- dengan realisasi Rp. 11.945.207.211 ,- (90,99%).

DPMPTSPPTK memiliki 13 (tiga belas) program 19 Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan yang menunjang pencapaian target sasaran. Secara umum capaian realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan berada pada kategori tinggi. Untuk realisasi fisik dan keuangan yang dibawah 100% pada umumnya merupakan bentuk efisiensi anggaran dan penggunaan sumber daya dalam melaksanakan program dan kegiatan.

LKJIP DPMPTSPPTK ini diharapkan menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal PTSP Kota Bukittinggi untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan inovasi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu perindustrian dan tenaga kerja. Dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia pengelola, penataan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, perbaikan perencanaan yang efektif dan efisien, pelaksanaan program dan kegiatan yang tepat guna serta peningkatan koordinasi dan konsultasi dalam berbagai pemecahan permasalahan penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	1
EXECUTIVE SUMMERY (IKHTISAR EKSEKUTIF)	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	7
 BAB I PENDAHULUAN	 8
1.1. Latar Belakang	8
1.2. Gambaran Umum Organisasi	10
1.3. Isu Strategis Perangkat Daerah	15
1.4. Sistematika Penulisan	17
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 19
2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah	19
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	26
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 33
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022	33
3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2022	53
 BAB IV PENUTUP	 74
4.1. Kesimpulan	74
4.2. Strategi Peningkatan Kinerja	74

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi	.21
Tabel 2.2	Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga kerja	22
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu satu pintu Perindustrian dan Tenaga kerja Kota Bukittinggi Tahun 2022	26
Tabel 2.4	Target Pendapatandan Anggaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustriahn dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2022	30
Tabel 3.1	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	33
Tabel 3.2	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja DPMPTSPPTK Tahun 2022	34
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja DPMPTSPPTK Tahun 2021 dan Tahun 2022	37
Tabel 3.8	Perbandingan Capaian Kinerja DPMPTSPPTK dengan beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	41
Tabel 3.5	Efisiensi Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2022	44
Tabel 3.6	Realisasi Pendapatan dan Belanja	54

DPMPTSPPTK

Tahun 2022

Tabel 3.7	Realisasi Anggaran dan Fisik Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2022	55
-----------	---	----

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustriandan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai salah satu instansi dibawah naungan Pemerintah Kota Bukittinggi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang selanjutnya disebut LKJIP DPMPTSPPTK.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPMPTSPPTK) Kota Bukittinggi maka perlu disusun laporan kinerja yang memuat capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel dalam LKJIP DPMPTSPPTK. Penyusunan LKJIP DPMPTSPPTK ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan tata pemerintahan yang bersih (*clean government*) di Kota Bukittinggi khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Capaian kinerja pada penyusunan LKJIP DPMPTSPPTK dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai pada satu tahun anggaran. Capaian kinerja juga diukur dengan membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun sebelumnya serta dengan target kinerja pada akhir tahun perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah.

a. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan LKJIP Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2022 adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

b. Maksud dan Tujuan

Sebagai bentuk pertanggung jawaban Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selama satu tahun anggaran, yang bertujuan untuk mencapai sasaran strategis Perangkat Daerah maka disusun LKJIP DPMPTSPPTK. Dokumen ini juga merupakan instrumen untuk mengontrol peningkatan kinerja setiap Perangkat Daerah.

Penyusunan LKJIP DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sesuai target oleh Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja DPMPTSPPTK Tahun 2022. Selanjutnya diharapkan juga dapat mendorong dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan benar yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. LKJIP DPMPTSPPTK juga berguna untuk evaluasi dalam upaya melakukan perbaikan yang berkelanjutan dalam meningkatkan kinerja serta dalam meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai bagian dari pelayanan public yang diberikan kepada masyarakat Kota Bukittinggi.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah Kota Bukittinggi menetapkan bahwa Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi. Adapun ruang lingkup Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

- a. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan unsur Pelaksana urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja .
- b. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian dan tenaga kerja.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan Tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian dan tenaga kerja;
- c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian dan tenaga kerja;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian dan tenaga kerja;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- f. pengkoordinasian kebijakan dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Struktur Organisasi

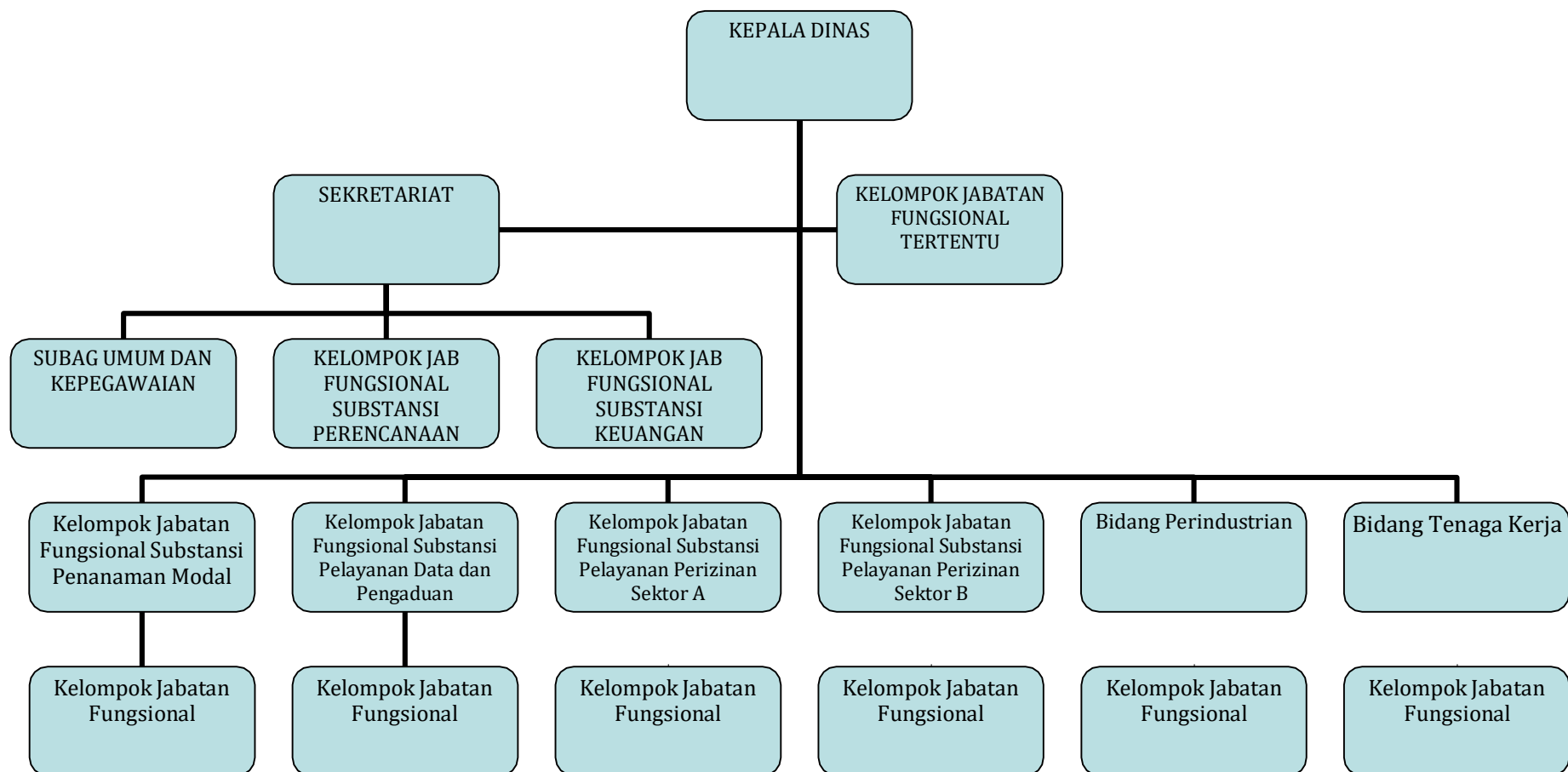
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja, Kota Bukittinggi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 1. Sub bagian Umum dan kepegawaian
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan
 3. Kelompok jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal,
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Potensi Investasi
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan dan Promosi Penanaman Modal
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Sistem Informasi Data Penanaman Modal
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Perizinan Sektor A
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Proses Perizinan I Sektor A
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Proses Perizinan II Sektor A
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeriksaan Administrasi dan Penyerahan Izin Sektor A
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Perizinan Sektor B
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Proses Perizinan I Sektor B
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Proses Perizinan II Sektor B
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeriksaan Administrasi dan Penyerahan Izin Sektor B

- f. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Data, Pengaduan dan Pelaporan
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Informasi Data dan Pelaporan Perizinan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan dan Pengaduan Perizinan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan dan Pengendalian Program Perizinan
- g. Bidang Perindustrian
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Industri Agro
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Industri Non Agro
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerjasama, Kelembagaan, Pengembangan Teknologi dan Perlindungan industri
- h. Bidang Tenaga Kerja
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial
- i. UPTD

Gambar 1.1

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022**



1.3. ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan pada gambaran pelayanan DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi; visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota, sasaran jangka menengah pada Renstra BKPM RI, sasaran jangka menengah pada Renstra BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat dan implikasi RTRW bagi pelayanan DPMPTSPPTK serta metode analisis SWOT pada BAB II, selanjutnya dapat diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Harmonisasi dan sinkronisasi dalam peraturan dan perundang-undangan telah membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi sebagai instansi teknis yang menangani bidang penanaman modal, perizinan, perindustrian dan tenaga kerja sehingga dapat memainkan peran dalam menggerakkan sektor perekonomian.
2. Kemajuan di bidang tata kelola pemerintahan, kompetensi SDM (kompetensi teknis, konseptual maupun untuk berinteraksi secara aktif) dan kecukupan infrastruktur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan sehingga dapat mengantisipasi perkembangan global dengan membangun sikap kompetitif, handal, berwawasan, kreatif dan inovatif. Karena perubahan lingkungan akan menuntut perubahan besar dan mendasar dalam berbagai tatanan dunia kerja dan berperan aktif dalam pembangunan Kota Bukittinggi.
3. Perkembangan teknologi dan informasi dalam konsep tata pemerintahan dan pelayanan publik modern harus diikuti oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi, yang pengembangannya terintegrasi dalam pelayanan perizinan, pengawasan, dan ketersediaan data perizinan yang up to date. Serta diharapkan dapat menjadikan teknologi dan informasi yang dikembangkan juga menjadi sarana dalam pelayanan pencari kerja, informasi pasar kerja, informasi produk industri kecil menengah dan informasi bentuk fasilitasi pelatihan ketenagakerjaan yang dikelola DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi.

Kondisi potensi dan peluang investasi di Kota Bukittinggi sebagai sebuah kawasan destinasi pariwisata dan perdagangan diyakini akan memicu pertumbuhan investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan

Penanaman Modal Asing (PMA). Hal ini juga mengharuskan pemerintah sebagai perantara dalam menciptakan hubungan industrial yang kondusif antara perusahaan sebagai pemberi kerja dengan pekerja/buruh sehingga kedua belah pihak dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dilandasi dengan azas kesamaan dalam hukum dan azas kesetaraan keadilan.

4. Perubahan struktur pasar dan selera masyarakat terhadap kualitas produk industri kecil menengah akan memberikan pengaruh terhadap daya saing produk IKM sehingga IKM harus meningkatkan inovasi dan kreatifitas dalam produk dan strategi bisnis. Fasilitasi dan pembinaan dari DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi juga memegang peran yang penting dalam mendukung perkembangan Industri Kecil Menengah.
5. Besarnya jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja serta struktur lapangan kerja yang tidak seimbang mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran, yang akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja, mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja, perluasan kesempatan kerja dengan mengembangkan industri kecil menengah diharapkan dapat menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta.
6. Rendahnya kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja. Perluasan lapangan kerja tetap merupakan masalah yang cukup mendesak dalam pembangunan sosial ekonomi Indonesia. Disamping kelebihan tenaga kerja, kondisi pasar kerja di Kota Bukittinggi ditandai dengan pasar kerja yang kurang berkualitas di mana pendidikan angkatan kerja relatif masih rendah.
7. Peran pemerintah daerah dalam menciptakan hubungan industrial yang kondusif. Hubungan industrial adalah sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku di dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Saat ini hubungan industrial di Kota Bukittinggi masih memiliki kendala, diantaranya kondisi hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, seperti : Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, Lembaga Kerja

Sama Bipartit dll.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan LKJIP DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

Bab. I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. Dengan urutan sebagai berikut :

1.1. Latar Belakang

Berisikan latar belakang penyusunan LKJIP Perangkat Daerah Tahun 2022

1.2. Gambaran Umum Organisasi

1.3. Penjelasan mengenai tugas pokok dan fungsi beserta struktur organisasi Perangkat Daerah

1.4. Isu Strategis Perangkat Daerah

1.5. Penjelasan mengenai isu-isu/ permasalahan-permasalahan strategis yang sedang dihadapi Perangkat Daerah

1.6. Sistematika Penulisan

1.7. Penjelasan mengenai sistematika penulisan LKIP

Bab. II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan dengan urutan sebagai berikut :

II.1. Rencana Strategis Perangkat daerah

Berisikan penjelasan mengenai Rencana Strategis Perangkat daerah yang telah diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi yang merupakan penjabaran dari pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah selama Tahun 2021 – 2026.

II.2. Perjanjian Kinerja

Penjelasan mengenai Perjanjian Kinerja PD tahun 2022

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi. Untuk setiap sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Perbandingan antara target kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja tahun 2022.
- 2) Perbandingan antara capaian kinerja Tahun 2021 dengan capaian kinerja 3 (tiga) Tahun terakhir (2019, 2020, dan 2021)
- 3) Perbandingan antara capaian kinerja Tahun 2022 dengan Kab/Kota di Sumbar dan nasional (jika ada)
- 4) Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /Penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- 5) Alternatif solusi yang dilakukan jika pencapaian indikator tidak/ belum mencapai target
- 6) Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya
Didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumberdaya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin

$$\text{Efisiensi} = 100\% - \left(\frac{\text{serapan Anggaran} \times 100}{\text{Capaian kinerja IKU}} \right)$$
 Program atau kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian Indikator
- 7) Program atau Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian indikator

Bab IV PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Diuraikan mengenai simpulan umum atas capaian kinerja Perangkat Daerah

IV.2. Strategi Peningkatan Kinerja

Penjelasan mengenai strategi/Langkah-langkah yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang untuk meningkatkan kinerja Perangkat daerah

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Bukittinggi telah menuangkan rencana pembangunan jangka menengah dalam dokumen RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026, yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Kemudian pada tingkat Perangkat Daerah rencana pembangunan jangka menengah ini dijabarkan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja telah menyusun dokumen perencanaan strategis dalam Renstra Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026.

Dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kota Bukittinggi pada RPJMD Kota Bukittinggi 2021-2026 yaitu: **“Menciptakan Bukittinggi Hebat, Berlandaskan Adat Basandi Syara’”, Syara’ Basandi Kitabullah**”, maka dirumuskanlah kerangka pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi untuk periode 5 (lima) tahun dalam Renstra DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi 2021-2026. Misi pada RPJMD yang menaungi Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah :

1. Misi 1 yaitu Hebat dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan
2. Misi 5 yaitu Hebat dalam Tata Kelola Pemerintahan

Renstra DPMPTSPPTK Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah dalam pengembangan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan Perangkat Daerah, yang memuat

a. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis.

Berdasarkan Visi dan misi diatas, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi sebagai berikut :

1. Meningkatnya daya beli Masyarakat, dengan indikator pengeluaran perkapita
2. Meningkatnya Investasi hijau, dengan indikator pertumbuhan PMTB, dan Persentase Realisasi Investasi Hijau
3. Meningkatnya kesempatan kerja, dengan indikator Tingkat Pengangguran terbuka
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan Publik

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurunwaktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Adapun Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi sesuai dengan Tujuan di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kewirausahaan dan keberdayaan Industri Kecil dan menengah (IKM)
2. Terbangunnya iklim Investasi Hijau yang kondusif
3. Meningkatnya kualitas Angkatan kerja
4. Meningkatnya perlindungan ketenagakerjaan
5. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Meningkatnya kewirausahaan dan keberdayaan Industri kecil menengah	Pengeluaran Perkapita	13.721,86	13.859,08	13.997,67	14.137,65	14.279,02
2	Meningkatnya Investasi Hijau	Terbangunnya iklim investasi hijau yang kondusif	Pertumbuhan PMTB	3,80%	4.00%	4,20%	4%	4,5%
			Persentase Realisasi Investasi Hijau	60%	65%	70%	75%	80%
3	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Meningkatnya kualitas Angkatan kerja, dan meningkatnya perlindungan ketenagakerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,02%	5,96%	5,90%	5,84%	5,78%
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan Publik	90,01	92,22	95,03	96,08	97,06

b. Strategi dan Kebijakan

Sebagai penjabaran tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi, maka ada beberapa strategi dan arah kebijakan yang diambil untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi, yaitu misi 1 “Hebat dalam peningkatan Ekonomi Kerakyatan” dan misi 5 “Hebat dalam Tata Kelola Pemerintahan”. Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Bukittinggi

Visi : Menciptakan Bukittinggi Hebat

Misi 1 RPJMD : Hebat dalam Peningkatan Ekonomi
Kerakyatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1. Meningkatkan Daya Beli masyarakat	Meningkatkan Kewirausahaan dan Keberdayaan Industri Kecil dan Menengah	1. Meningkatkan kualitas pengelolaan industry kecil dan menengah	1. Meningkatkan Pembinaan SDM pengelola industry kecil menengah 2. Meningkatkan kemampuan teknologi industry 3. Meningkatkan kualitas produk IKM yang bermutu 4. Mengembangkan promosi produk IKM yang berbasis digital 5. Menciptakan IKM yang memiliki legalitas Usaha
		2. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi terhadap industry kecil menengah	1. Melakukan penataan struktur industry 2. Pengembangan terhadap sentra-sentra potensial industry 3. Meningkatkan kapasitas aparatur bidang industri
2. Meningkatkan Investasi Hijau	Terbangunnya iklim investasi hijau yang kondusif	1. Penerapan kebijakan penanaman modal	1. Review peraturan penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan 2. Pelaksanaan pengendalian pelaporan LKPM 3. Penyediaan data PMDN dan PMA

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		2. Mendorong berkembangnya investasi pada berbagai sektor ekonomi	7.a. Peningkatan efektifitas dan upaya promosi investasi 7.b. Meningkatkan Kerjasama kelompok usaha besar dan usaha kecil menengah 7.c. Memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi dalam pelayanan perizinan berusaha
3. Meningkatkan kesempatan kerja	Meningkatkan kualitas Angkatan kerja	Meningkatkan kualitas tenaga kerja	1. Peningkatan kualitas pencari kerja melalui pemagangan 2. Peningkatan pelatihan berbasis kompetensi yang mengacu pada kualifikasi dan pengembangan produktifitas tenaga kerja 3. Pembinaan Lembaga Latihan kerja yang berkualitas dan memiliki standarisasi kompetensi
		Menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada pencari kerja	1. Pelaksanaan Pembinaan dan pelatihan kewirausahaan terhadap pencari kerja 2. Peningkatan akses permodalan terhadap pencari kerja
		Meningkatkan layanan antar kerja	1. Pengembangan informasi pasar kerja 2. Peningkatan kualitas pelayanan pencari kerja
	Meningkatnya perlindungan ketenagakerjaan	Menegakkan regulasi ketenagakerjaan dalam hubungan industrial yang sehat dan produktif	1. Peningkatan kepatuhan dalam penerbitan peraturan perusahaan dan perjanjian Kerjasama 2. Peningkatan pemahaman kepada pengusaha dan pekerja

			mengenai hubungan kerja 3. Peningkatan koordinasi dan Kerjasama Lembaga penegakan hukum ketenagakerjaan
--	--	--	--

Visi : Menciptakan Bukittinggi Hebat

Misi 5 RPJMD : Hebat dalam Tata Kelola Pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatnya Kualitas layanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dukungan layanan dalam bentuk review 2. Penyusunan standar pelayanan, standar operasional prosedur dan maklumat pelayanan 3. Peningkatan nilai indeks kepuasan masyarakat 4. Peningkatan nilai indeks kepuasan masyarakat 5. Pelaksanaan monitoring unit layanan 6. Penyusunan dan pelaksanaan system manajemen mutu 7. Penyelesaian pengaduan masyarakat terkait perizinan dan non perizinan

		Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara online	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem teknologi informasi 2. Penyiapan sarana dan prasarana jaringan serta teknologi informasi 3. Pelaksanaan digitalisasi Arsip
		Peningkatan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektifitas kinerja pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarana dan prasarana kantor 2. Pengembangan SDM Pengelola Perizinan dan non Perizinan 3. Penyusunan standarisasi SDM Pengelola perizinan dan non perizinan

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen pimpinan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam periode satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian kinerja bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kinerja aparatur. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Perangkat Daerah, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja tahun 2022 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi merupakan dokumen tahunan yang berisi pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Kepala DPMPTSPPTK dengan Walikota Bukittinggi. Dalam penyusunannya perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU dan anggaran atau DPA. Berikut ini Perjanjian Kinerja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2022:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kewirausahaan dan keberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM)	Pengeluaran perkapita	13.721,86
		Tingkat kontribusi sektor industry pengolahan	5,24 %
2	Terbangunnya iklim investasi hijau yang kondusif	Persentase realisasi Investasi Hijau	60 %
		Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	3,80 %
		Indeks Kemudahan Berusaha	70
3	Meningkatnya daya saing Angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,02 %
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,01 %
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan	90,01 %

Dalam mencapai target Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam intern Dinas disusun Perjanjian Kinerja antara eselon III dengan eselon II dan eselon IV dengan eselon III berdasarkan kegiatan yang dijalankan oleh masing-masing pejabat terkait (terlampir). Capaian target pada Perjanjian Kinerja di atas juga didukung dengan program dan kegiatan serta anggaran Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi pada tahun 2022 melaksanakan 13 (Tiga belas) program 19 (sembilan belas) kegiatan, dan 34 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- Pada Dinas PMPTSPPTK
 1. Program Pelatihan kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
 - 1.1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - 1.1. a. Sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
 2. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - 2.1. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.a. Sub kegiatan Pelayanan Antar Kerja
 3. Program Hubungan Industrial
 - 3.1. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.a. Sub Kegiatan Pencegahan perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.b. Sub Kegiatan Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 4.1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
 - 4.1.a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 4.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 4.2.a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 4.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4.3.a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.3.b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4.3.c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.3.d. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 4.3.e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah
- 4.4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 4.4.a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 4.4.b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - 4.4.c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4.4.d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - 5.1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.1.a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
6. Program Promosi Penanaman Modal
 - 6.1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 6.1.a. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

6.1.b. Sub Kegiatan Pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah kabupaten/Kota

7. Program Pelayanan Penanaman Modal

7.1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

7.1.a. Sub Kegiatan Penyediaan pelayanan terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik

7.1.b. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

7.1.c. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

8. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

8.1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

8.1.a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

8.1.b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

9. Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

9.1. Kegiatan Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota

9.1.a. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis system pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik

10. Program Perencanaan dan Pengembangan Industri

10.1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

10.1.a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri

10.1.b. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

11. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

11.1. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

11.1.a. Sub Kegiatan Diseminasi Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINAS

12. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (UPTD Kerajinan Industri)

12.1. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

12.1.a. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

13. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (UPTD)

13.1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

13.1.a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Tabel 2.4
Target Pendapatan dan Anggaran Belanja Pada Dinas
Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	APBD	APBD P	%
	PENDAPATAN			
1	Retribusi pemakaian Alat	70.000.000	70.000.000	
2	Retribusi pemberian izin mendirikan Bangunan	750.000.000	180.000.000	
	Total Pendapatan	820.000.000	250.000.000	
	BELANJA			
1	Belanja Tidak Langsung	6.954.918.247	6.766.531.902	
2	Belanja Langsung	5.541.938.126	6.361.425.691	
	Total Belanja	12.496.856.373	12.865.868.593	

- Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja pada Tahun Anggaran 2022 memiliki target penerimaan Pendapatan Retribusi pemanfaatan kekayaan daerah dan retribusi IMB yang sah sebesar Rp.820.000.000,- dan penyesuaian pada perubahan anggaran menjadi Rp. 250.000.000,-.
- Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja pada Tahun Anggaran 2022 memiliki Belanja Tidak Langsung dengan anggaran Rp. 6.954.918.247,- dan mengalami pengurangan sebesar 1,95% menjadi Rp.6.766.531.902,- pada APBD Perubahan.
- Belanja Langsung dengan anggaran sebesar Rp. 5.541.938.126,- mengalami penambahan menjadi Rp. 6.361.425.691,- pada APBD P Tahun 2022.
- Secara keseluruhan total Belanja pada APBD yaitu Rp. 12.496.856.373,- menjadi Rp. 12.865.868.593,- pada APBD P Tahun 2022.
- Pada tahun 2022 DPMPTSPPTK melaksanakan 13 (tiga belas) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan, dan 34 Sub Kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022. Berikut dapat dijabarkan program dan kegiatan yang mendukung kegiatan internal atau operasional kantor DPMPTSPPTK dan program kegiatan yang mendukung capaian target sasaran DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi

- a. Anggaran untuk mendukung pelayanan internal dianggarkan dengan rincian menurut kelompok belanja sebagai berikut:

No	Program	Anggaran
1	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 9.120.757.678,-
2	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (pada UPTD)	Rp. 1.805.400,-

- b. Anggaran yang mendukung sasaran 1
"Meningkatnya kewirausahaan dan keberdayaan industri kecil menengah" yaitu:

No	Program	Anggaran
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 884.593.804,-

2	Program pengelolaan system Informasi Industri Nasional	Rp. 54.111.800,-
3	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 549.218.916,-

- c. Anggaran yang mendukung sasaran 2 “Terbangunnya iklim investasi hijau yang kondusif” yaitu :

No	Program	Anggaran
1	Program pengembangan iklim penanaman Modal	Rp. 238.176.000,-
2	Program promosi penanaman modal	Rp. 183.494.000,-
3	Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Rp. 403.823.443,-

- d. Anggaran yang mendukung sasaran 3 “Meningkatnya kualitas Angkatan kerja, dan meningkatnya perlindungan ketenagakerjaan” yaitu:

No	Program	Anggaran
1	Program pelatihan kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Rp. 652.160.100,-
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 8.379.500,-
3	Program Hubungan Industrial	Rp. 26.904.784,-

- e. Anggaran yang mendukung sasaran 4 “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan” yaitu:

No	Program	Anggaran
1	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 986.668.168,-
2	Program pengelolaan data dan system informasi penanaman modal	Rp. 17.864.000,-

BAB III III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggung jawaban kinerja atas target- target kinerja dan capaian kinerja selama tahun 2022 yang memuat realisasi dari suatu instansi pemerintah. Pada dasarnya ini merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi, khususnya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, serta analisis akuntabilitas keuangan.

Penilaian kinerja dilakukan dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2022. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran. Dari data yang dikumpulkan selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerjasesuai dengan tingkat capaian kinerja :

Tabel 3.1
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Berikut capaian kinerja DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi Tahun 2022 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022;

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi kinerja pada masing-masing indikator kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja DPMPTSPPTK
Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1	Meningkatnya Kewirausahaan dan Keberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM)	Pengeluaran Perkapita	13.721,86	13.633,00	99%
		Tingkat Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	5,24%	5,12%	98%
2	Terbangunnya iklim investasi hijau yang kondusif	Persentase realisasi Investasi Hijau	60%	20,14%	34%
		Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	3,80%	1,47%	39%
		Indeks Kemudahan berusaha	70%	72,17%	107%
3	Meningkatnya daya saing Angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,02%	6,09%	99%
		Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	70,01%	67,42%	96%
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan	90,01	95,15	106%

- a. Pengeluaran rata-rata perkapita merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga, dari target sebesar Rp. 13.721.860,- pada Tahun 2022, capaian realisasi pengeluaran perkapita penduduk Kota Bukittinggi sebesar Rp. 13.633.000,-, artinya tingkat capaian pengeluaran Perkapita Kota Bukittinggi adalah 99% dari target yang ditetapkan.
- b. Berdasarkan data BPS pada PDRB ADHB Tahun 2022, diperoleh realisasi dari kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 5,12 persen dengan target 5,24 persen, sehingga tingkat capaiannya adalah 98%. Tingkat capaian yang sedemikian mendekati target yang telah ditetapkan ini membuktikan bahwa perekonomian kota Bukittinggi telah Kembali pulih pasca Pandemi Covid-19 yang melanda dalam 2 Tahun terakhir, hal ini juga menunjukkan bahwa industri pengolahan sebagai salah satu sektor penunjang pariwisata yang merupakan sektor unggulan Kota Bukittinggi telah mampu berkontribusi positif bagi kemajuan perekonomian secara keseluruhan
- c. Secara definisi, investasi hijau merupakan investasi yang fokus pada aspek-aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola baik (environment, social, dan governance/ESG), yang tujuannya menjaga kelangsungan perekonomian dan kehidupan di muka bumi, dari target yang telah ditetapkan 60%, realisasi investasi hijau Kota Bukittinggi pada Tahun 2022 baru dapat dicapai 20,14% dengan nilai investasi sebesar Rp. 279.678.896.095,- dengan tingkat capaian 34%. Rendahnya tingkat capaian ini disebabkan oleh kondisi investasi di Bukittinggi didominasi oleh UMKM atau kategori UMK dan masih sedikitnya pelaku usaha yang menyampaikan Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) serta masih banyaknya pelaku usaha yang belum melakukan migrasi data NIB dari OSS1.1 ke OSS RBA. Total Nilai Investasi di Kota Bukittinggi Tahun 2022 adalah Rp. 1.388.765.962.703.
- d. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain

seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Target PMTB Kota Bukittinggi pada Tahun 2022 adalah 3,80% dan hanya terealisasi 1,71%, yang artinya tingkat capaiannya hanya 45%. Data yang tersedia adalah data Tahun 2021 sedangkan data 2022 akan rilis pada Bulan April 2022.

- e. Pengukuran terhadap tingkat kemudahan Penanaman Modal yang diukur oleh Kementerian Investasi melalui 11 indikator, yaitu: 1) Struktur organisasi; 2) Kewenangan; 3) Sumberdaya Aparatur; 4) Kepatuhan; 5) Komitmen jangka waktu pelayanan; 6) Aplikasi perizinan; 7) Indeks kepuasan masyarakat; 8) Pelayanan/helpdesk pengaduan; 9) Sarana prasarana; 10) media informasi; 11) Kinerja DPMPTSPPTK. Dengan target 70 telah terealisasi 72,17%. Penghitungan indeks kemudahan penanaman modal dilaksanakan dengan kajian yang dikerjasamakan dengan perguruan tinggi.
- f. Berdasarkan definisi bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Bukittinggi tahun 2022 sebesar 6,09 persen, sedangkan target yang ditetapkan 6,02%. Dapat dilihat bahwa TPT Kota Bukittinggi masih tinggi jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, namun tingkat capaian Tahun 2022 ini (99%) jauh lebih baik dibandingkan dengan Tahun sebelumnya yang hanya 79% dari target yang telah ditetapkan.
- g. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. Pada Tahun 2022 Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Kota Bukittinggi adalah 67,42% dari Target 70,01% sehingga Tingkat capaiannya adalah 96%
- h. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilaksanakan setiap tahun pada DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi sebagai bentuk penilaian kinerja dan evaluasi terhadap pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat. Pada Tahun 2022 IKM Pelayanan Perizinan sebesar 95,15% dari target sebesar 90,01%.

2. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Capaian Kinerja 3 Tahun Terakhir

Perbandingan sasaran strategis dan indikator sasaran untuk tahun 2022 dan capaian tahun sebelumnya ditampilkan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja DPMPTSPPTK
Tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022

N o	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	REALISAS I	PERSENTAS E TINGKAT CAPAIAN
2019					
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	86%	79,75%	93%
2.	Meningkatnya peluang investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	8%	16%	200%
3.	Meningkatnya kontribusi sektor Industri pengolahan	Tingkat kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB	3,8%	4,11%	91%
4.	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran terbuka	5,5%	6,59%	88%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN
2020					
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	88%	79,64%	90,5%
2.	Meningkatnya peluang investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	7%	6,1%	87,14%
3.	Meningkatnya kontribusi sektor Industri pengolahan	Tingkat kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB	5,8%	5,03%	86,72%
4.	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran terbuka	5%	6,14%	79%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN
2021					
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	90%	82,93%	92%
2.	Meningkatnya peluang investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi	8%	6,10%	76%
3.	Meningkatnya kontribusi sektor Industri pengolahan	Tingkat kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB	6%	5,03%	84%
4.	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran terbuka	5%	7,15%	69%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN
2022					
1	Meningkatnya Kewirausahaan dan Keberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM)	Pengeluaran Perkapita	13.721,86	13.633,00	99%
		Tingkat Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	5,24%	5,12%	98%
2	Terbangunnya iklim investasi hijau yang kondusif	Persentase realisasi Investasi Hijau	60%	20,14%	34%
		Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	3,80%	1,47%	39%
		Indeks Kemudahan berusaha	70	75	107%
3	Meningkatnya daya saing Angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,02%	6,09%	99%
		Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	70,01%	67,42%	96%
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan	90,01	95,15	106%

- a. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilaksanakan setiap tahun pada DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi sebagai bentuk penilaian kinerja dan evaluasi terhadap pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat. Pada tahun 2021 capaian IKM perizinan sebesar 82,93%, sedangkan pada Tahun 2022 DPMPTSPPTK tidak melaksanakan lagi Survey IKM karena survei serupa sudah dilaksanakan pada

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dengan capaian 95,15% sehingga terjadi perbaikan sebesar 12,22%. Peningkatan IKM pada Tahun 2022 ini telah sesuai dengan harapan dan bahkan telah melampaui target yang telah ditetapkan, dengan dimulainya operasional MPP Kota Bukittinggi pada tahun 2022 kualitas pelayanan penanaman modal PTSP dapat semakin meningkat.

- b. Persentase peningkatan realisasi investasi belum mengalami peningkatan, untuk tahun 2020 tercapai 6,1% dari target 7 %. Sedangkan tahun 2021 yang ditarget 8% terealisasi 6,1 %. Kondisi ini disebabkan oleh dampak dari beberapa kebijakan pemerintah dalam menghambat penyebaran Covid-19, seperti adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga berkurangnya investor dalam melakukan investasi di Kota Bukittinggi. Untuk Tahun 2022 Indikator sasaran strategis. Untuk Tahun 2022 sasaran berkaitan dengan investasi, Indikatornya dibagi menjadi 3 yakni Persentase realisasi Investasi hijau dengan target 60% dapat terealisasi 20,14%, PMTB dengan target 3,80% terealisasi 1,47% dan indeks kemudahan berusaha yang ditargetkan 70%, terealisasi 72,17%
- c. Tingkat kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB Kota Bukittinggi pada Tahun 2021 yaitu 5,19% dibawah target yaitu 6%, dengan tingkat capaian indikator sebesar 84%. Sedangkan untuk Tahun 2022 sasaran yang berkaitan dengan kewirausahaan Indikatornya dibagi menjadi 2 yakni Pengeluaran perkapita dengan capaian 13.633.000 dari target 13.721.860 sehingga tingkat capaiannya adalah 99 %, dan Tingkat kontribusi sektor industri pengolahan dengan target 5,24% terealisasi 5,12% sehingga tingkat capaian mencapai 98%
- d. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Untuk tahun 2021 target TPT Kota Bukittinggi sebesar 4,93% dan terealisasi 7,15%. Sedangkan Tahun 2022 berkaitan dengan sasaran daya saing Angkatan kerja dibagi menjadi 2 Indikator yang masing – masingnya adalah Tingkat pengangguran terbuka yang ditargetkan 6,02% terealisasi 6,09%, dan Tingkat partisipasi Angkatan kerja dengan target 70,01 terealisasi 67,42%

3. Perbandingan antara Capaian Kinerja 2022 dengan Kab/Kota di Sumbar dan Nasional

Tabel 3.8**Perbandingan capaian kinerja Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi dengan beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat :**

No	Sasaran Straregis	Indikator Kinerja	Kota Bukittinggi	Kota Padang	Kota Pdg Panjang	Kota Solok	Kota Payakumbuh	Kota Pariaman	Kabupaten Agam	Kabupaten Tanah Datar
1	Meningkatnya Kewirausahaan dan Keberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM)	Pengeluaran Perkapita	13.633,00	14.540	10.754	12.168	13.317	12.818	9.662	10.616
		Tingkat Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	5,12%	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
2	Terbangunnya iklim investasi hijau yang kondusif	Persentase realisasi Investasi Hijau	30%	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
		Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	1,47%	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
		Indeks Kemudahan berusaha	75	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
3	Meningkatnya daya saing Angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,09%	13,37	4,90	5,15	6,47	6,09	5,06	4,79
		Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	67,42%	63,78	65,94	66,51	71,73	62,7	66,49	69,42
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan	95,15	87,30	99	85,95	97,49	94,53	88,86	88,04

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan/kegagalan yang dihadapi selama tahun 2022 adalah sebagai berikut

Penyebab keberhasilan:

- a. Optimalisasi penggunaan anggaran tahun 2022 dengan penyerapan anggaran mencapai 90,99% dengan rincian 94,01% untuk belanja tidak langsung dan 87,78% untuk Belanja Langsung;
- b. Adanya komitmen semua pejabat struktural, maupun fungsional dan pelaksana pada Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi untuk merealisasikan perjanjian kinerja;
- c. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi;
- d. Mengoptimalkan sarana prasarana yang tersedia;
- e. Menerapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penanaman modal, perizinan, perindustrian dan ketenagakerjaan.

Penyebab kegagalan:

- a. Ketersediaan SDM pada Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi yang masih terbatas. Berdasarkan Anjab seharusnya berjumlah 80 orang, sedangkan saat ini hanya tersedia 54 orang
- b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung peningkatan pelayanan berupa belum adanya Genset sebagai antisipasi terjadinya pemadaman Listrik pada Mal Pelayanan Publik.

5. Alternatif Solusi yang dilakukan jika Pencapaian Indikator tidak/belum mencapai target

Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala dan hambatan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas SDM dengan workshop, dan

bimtek yang terkait dengan pelayanan penanaman modal, perizinan, perindustrian dan ketenagakerjaan

- b. Mengusulkan penambahan SDM sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan
- c. Mengusulkan penambahan sarana pendukung untuk peningkatan pelayanan lebih maksimal dan melakukan pemeliharaan terhadap sarana yang tersedia

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan sumber Daya

Selama Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain:

- a. Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
- b. Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.
- c. Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- d. Melakukan cascading kinerja dalam menyusun program dan kegiatan pada Tahun 2022, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2022. Dapat dilihat pada table berikut kegiatan yang dieliminasi sesuai cascading kinerja DPMPTSPPTK :

Tabel 3.5
Efisiensi Dinas Penanaman Modal PTSP
Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi
Tahun 2022

No	PROGRAM	Efisiensi *Rp)
1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	129.693.639
2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	316.300
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	8.807.384
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	626.290.936
5	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	21.159.395
6	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	4.601.710
7	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	84.066.838
8	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	114.248.603
9	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	870.200
10	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	167.215.191
11	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	9.754.700
	UPTD KERAJINAN INDUSTRI	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	282.400
2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	15.443.086
	JUMLAH	1.182.750.382

7. Program/Kegiatan Penunjang keberhasilan Pencapaian Indikator

- a. Program yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian Indikator Sasaran Dinas PMPTSPPTK antara lain :

No	PROGRAM	INDIKATOR	REALISASI FISIK/ KINERJA	REALISASI KEUANGAN
1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan wirausaha muda mandiri	100,00%	80,11%
2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran peningkatan pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	100,00%	96,23%
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penurunan kasus hubungan industrial	100,00%	67,26%
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	102,50%	93,13%
5	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kemudahan berusaha	100,00%	91,12%
6	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi Hijau	100,00%	97,49%
7	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase unsur pelayanan berkategori baik	100,00%	91,48%
8	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian LKPM yang dilaksanakan	95,00%	71,71%
9	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data Informasi perizinan secara online	100,00%	95,13%
10	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan Pembinaan Persentase	100,00%	81,10%

		pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM)		
11	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaan	100,00%	81,97%
	UPTD KERAJINAN INDUSTRI			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	100,00%	84,36%
2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaan Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM)	100,00%	97,19%
	JUMLAH		99,81%	90,99%

Dari 11 (sebelas) program yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi ditambah 2 program pada UPTD Kerajinan Industri Tahun 2022 jika dilihat dari realisasi fisik pada umumnya berada pada kategori sangat baik bahkan mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi keuangan berada dibawah 100%, kondisi ini disebabkan oleh adanya efisiensi penggunaan anggaran yang telah dilakukan, sebagai berikut:

1) Program Pelatihan kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja

Program ini bertujuan untuk memenuhi persentase peningkatan wirausaha mandiri, terdiri atas 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Anggaran yang alokasi untuk mendukung program ini yakni sebesar Rp.652.160.100,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.522.466.461,- (80,11%).

2) Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan besaran peningkatan pencari kerja terdaftar yang ditempatkan, terdiri atas 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 8.379.500,- dengan

realisasi sebesar Rp.8.063.200,- dan realisasi mencapai angka 96,23%.

- 3) Program Hubungan Industrial
Program ini untuk menurunkan kasus hubungan industrial, terdiri atas 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Dengan alokasi anggaran program Rp.26.904.784,- dengan realisasi Rp. 18.097.400,- dan tingkat capaian 67,26%.
- 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai Sakip Perangkat Daerah, terdiri atas 7 kegiatan dan 16 sub kegiatan. Dengan alokasi anggaran program Rp. 9.120.757.678,- dengan realisasi Rp. 8.494.466.742,- dengan tingkat capaian 93,13%.
- 5) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Program ini bertujuan untuk meningkatkan Persentase kemudahan berusaha, dengan alokasi anggaran program Rp. 238.176.000,- dengan realisasi Rp. 217.016.605,- dan tingkat pencapaian 91,12%.
- 6) Program Promosi Penanaman Modal
Program ini bertujuan meningkatkan Nilai Realisasi Investasi Hijau dengan alokasi anggaran Rp. 183.494.000,- dengan realisasi Rp. 178.892.290,- dengan tingkat pencapaian 97,49%.
- 7) Program Pelayanan Penanaman Modal
Program ini bertujuan untuk meningkatkan Persentase unsur pelayanan berkategori baik, dengan alokasi anggaran program Rp. 986.668.168,- dengan realisasi Rp. 902.601.330,- dan tingkat pencapaian 91,48%.
- 8) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Program ini bertujuan untuk Meningkatkan persentase pengendalian LKPM yang dilaksanakan, dengan alokasi anggaran Rp. 403.823.443,- yang terdiri atas 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar 360.215.992,- dan dari APBD sebesar 43.607.451,- dengan realisasi Rp. 289.574.840,- dan tingkat pencapaian 71,71%.
- 9) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Program ini bertujuan untuk meningkatkan Persentase data informasi perizinan secara online dengan alokasi anggaran Rp. 17.864.000,- dengan realisasi Rp. 16.993.800,- dengan tingkat pencapaian 95,13%.
- 10) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaan dan persentase pertumbuhan IKM yang terdiri atas 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan termasuk 1 sub kegiatan berada pada UPTD kerajinan Industri dan 2 sub kegiatan pada Bidang Industri dengan alokasi anggaran Rp. 884.593.804,- dengan realisasi Rp. 717.378.613,- dan tingkat pencapaian 81,10%.

- 11) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Program ini bertujuan untuk meningkatkan Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaan, terdiri atas 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan alokasi anggaran 54.111.800,- dan realisasi anggaran Rp. 44.357.100,-
- 12) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (UPTD)
Yang terdiri atas 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Dengan alokasi anggaran program Rp. 1.805.400,- dengan realisasi Rp. 1.523.000,- dengan tingkat capaian 84,36%.
- 13) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (UPTD)
Yang terdiri atas 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Dengan alokasi anggaran program Rp. 549.218.916,- dengan realisasi Rp. 533.775.830,- dengan tingkat capaian 97,19%.

b. Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian: Capaian masing-masing kegiatan sebagai berikut:

No	PROGRAM	INDIKATOR	REALISASI FISIK/ KINERJA	REALISASI KEUANGAN
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan Jumlah peserta pelatihan kuliner Jumlah peserta pelatihan menjahit Jumlah peserta pelatihan perbengkelan Jumlah peserta	100%	80,11%

		pelatihan tata boga		
2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah laporan pencari kerja Jumlah lowongan kerja yang tersedia Jumlah pencari kerja terdaftar	100,00 %	96,23%
3	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah asistensi hubungan industrial yang dilaksanakan	100,00 %	67,82%
4	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus hubungan industrial yang ditangani	100,00 %	66,84%
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	100,00 %	96,61%
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan Tunjangan	100,00 %	94,01%
7	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah pelaksanaan pengamanan kantor Jumlah tenaga kontrak pengamanan kantor	100,00 %	99,38%

8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis peralatan listrik yang dibeli	100,00 %	100,00%
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan	100,00 %	99,16%
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis alat tulis yang dibeli	100,00 %	99,62%
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen yang dicetak Jumlah dokumen yang digandakan Jumlah Dokumen yang dijilid	100,00 %	94,59%
12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu yang difasilitasi Jumlah penyediaan makanan minuman tamu	100,00 %	67,39%
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan rapat yang dihadiri	100,00 %	90,59%
14	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 2	100,00 %	99,24%
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa pengiriman Paket Jumlah Buku Cek Jumlah Materai	95,00%	65,25%
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air yang dibayar Jumlah rekening internet yang dibayar Jumlah Rekening Listrik yang dibayar Jumlah Rekening Telepon yang dibayar	100,00 %	83,39%
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Esselon 2 terpelihara	100,00 %	70,87%

18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Roda 2 terpelihara Jumlah kendaraan roda 4 terpelihara	100,00 %	92,06%
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa perbaikan peralatan kantor	100,00 %	98,38%
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara Jumlah tenaga kontrak kebersihan	100,00 %	99,36%
21	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen insentif penanaman modal Jumlah dokumen Perda Penanaman Modal	100,00 %	91,12%
22	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi promosi Penanaman Modal Jumlah Layanan Informasi Penanaman Modal	100,00 %	97,05%
23	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Investasi yang diikuti Jumlah Temu kemitraan yang dilaksanakan Media Informasi Penanaman Modal	100,00 %	98,26%
24	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Aplikasi yang dikelola Jumlah izin yang diterbitkan Persentase jumlah izin yang diproses	100,00 %	91,97%
25	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non	Penyusunan Draft Standar Pelayanan	100,00 %	84,66%

	Perizinan Penanaman Modal			
26	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase pengaduan perizinan yang ditangani	100,00 %	86,72%
27	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan Realisasi Investasi Laporan Rencana Investasi Tenaga Ahli Admin LKPM dan Pendamping OSS	95,00%	74,12%
28	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pengawasan pelaksanaan penanaman Modal Jumlah Peserta Sosialisasi Penyelesaian Permasalahan Perusahaan	95,00%	71,42%
29	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Berkas perizinan yang divalidasi Jumlah laporan data perizinan Persentase informasi perizinan yang diterbitkan	100,00 %	95,13%
30	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang difasilitasi sertifikat halal Jumlah Peserta fasilitasi pendaftaran Merk Jumlah Peserta Sosialisasi P3DN Jumlah Tenaga Kontrak Penyuluh Industri	100,00 %	89,01%

31	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Pameran dan Promosi yang diikuti Jumlah Peserta Magang Membatik Jumlah Peserta Pelatihan Membatik Jumlah Peserta Pelatihan Sulam	100,00 %	80,06%
32	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen data IKM Jumlah Peserta Sosialisasi Siinas Jumlah Video Promosi I ndustri	100,00 %	81,97%
UPTD KERAJINAN INDUSTRI				
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jenis alat kebersihan yang dibeli	100,00 %	84,36%
34	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah kerajinan industri yang dipelihara Jumlah Gedung UPTD yang dikelola Jumlah Organisasi mitra Industri yang difasilitasi	100,00 %	97,19%
JUMLAH			99,81%	90,99%

Dari uraian di atas dapat diperoleh bahwa 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan semuanya mendukung keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja, meskipun ada beberapa capaian fisik yang masih kurang 100%. Untuk capaian kinerja keuangan yang kurang 100% pada umumnya merupakan sisa lebih pelaksanaan kegiatan yang disebabkan adanya efisiensi dalam penyerapan anggaran.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Pada Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja memiliki target dan realisasi pendapatan dan belanja seperti pada table berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dan Belanja Pada Dinas
Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota
Bukittinggi Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I.	PENDAPATAN			
	Retribusi Pemakaian kekayaan daerah	70.000.000,-	75.351.900,-	107,6%
	Retribusi IMB	180.000.000,-	174.393.645,-	96,9%
	TOTAL PENDAPATAN	250.000.000,-	249.745.545,-	99,90%
II	BELANJA			
	Belanja Tidak Langsung	6.766.531.902,-	6.361.384.962,-	94,01%
	Belanja Langsung	6.361.425.691,-	5.583.822.249,-	87,78%
	TOTAL BELANJA	13.127.957.593,-	11.945.207.211,-	90,99%

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja pada Tahun Anggaran 2022 telah melaksanakan penerimaan Pendapatan Retribusi pemanfaatan kekayaan daerah dan retribusi IMB yang sah sebesar Rp.249.745.545,- (99,90%) dari target sebesar Rp.250.000.000,- dan Belanja Tidak Langsung dengan anggaran Rp. 6.766.531.902,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.361.384.962,- (94,01%) serta Belanja Langsung dengan anggaran sebesar Rp.6.361.425.691,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.583.822.249,- (87,78%). Secara keseluruhan total Belanja yaitu Rp. 13.127.957.593,- dengan realisasi Rp. 11.945.207.211 (90,99%). Pada tahun 2022 DPMPTSPPTK telah melaksanakan 11 (sebelas) program dan 19 Kegiatan dan 34 (tiga puluh dua) sub kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Realisasi anggaran dan fisik secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7

**Realisasi Anggaran dan Fisik Dinas Penanaman Modal PTSP
Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2020**

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capai Kinerja Fisik			Capaian Kinerja Keuangan			Ket
			Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)	Target	Realisasi	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PENDAPATAN					250,000,000.00	249.745.545.00	99,90%	
	Retribusi pemakaian Kekayaan Bersih					70,000,000.00	75.351,900.00	107,6%	
	Sewa Pemakaian Alat Berat/ Mesin					70,000,000.00	75.351.900,00	107,6%	
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan					180,000,000	174.393.645.00	96%	
	-Retribusi IMB					180,000,000	174.393.645.00	96%	
	BELANJA					13.127.957.593	11.945.207.211	90,99%	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG					6.766.531.902	6.361.384.962	94,01%	
	Belanja Pegawai					6.766.531.902	6.361.384.962	94,01%	
	- Belanja Gaji dan Tunjangan					4.131.604.284	3.934.250.981	95,22%	
	- Belanja Tambahan Penghasilan PNS					2.605.907.188	2.422.181.481	92,95%	
	- insentif pemungutan retribusi daerah					29.020.430	4.952.500	17,07%	

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capai Kinerja Fisik			Capaian Kinerja Keuangan			Ket
			Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)	
	BELANJA					6.361.425.691	5.583.822.249		
1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan wirausaha muda mandiri	2 persen	2 persen	100,00%	652.160.100	522.466.461	80,11%	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Besaran pencari kerja yang bersertifikat Kewirausahaan dan keterampilan Jumlah kelompok yang difasilitasi perbengkelan Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan Jumlah peserta pelatihan menjahit Jumlah peserta pelatihan tata boga Jumlah studi komparatif LPK Swasta yang dilaksanakan	50 persen 50 persen 1 kelompok 32 orang 20 orang 16 orang	100 persen 100 persen 1 kelompok 20 Orang 16 Orang -	100,00%	652.160.100	522.466.461	80,11%	
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan Jumlah peserta pelatihan kuliner Jumlah peserta pelatihan menjahit Jumlah peserta pelatihan perbengkelan Jumlah peserta pelatihan tata boga	16 orang 16 orang 20 orang 16 orang 16 orang	16 orang 16 orang 20 orang 16 orang 16 orang	100,00%	652.160.100	522.466.461	80,11%	
2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran peningkatan pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	127 orang	427 Orang	100,00%	8.379.500	8.063.200	96,23%	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DPMPTSPPTK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022

	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang memiliki kartu Pencari kerja	100 persen	100 persen (903 Orang)	100,00%	8.379.500	8.063.200	96,23%	
2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah laporan pencari kerja Jumlah lowongan kerja yang tersedia Jumlah pencari kerja terdaftar	12 laporan 5 perusahaan 20 orang	12 laporan 5 perusahaan 903 orang	100,00%	8.379.500	8.063.200	96,23%	
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penurunan kasus hubungan industrial	0 persen		100,00%	26.904.784	18.097.400	67,26%	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus hubungan industrial yang tertangani dengan baik Persentase perusahaan yang dilakukan pembinaan	100 persen 50 persen	100 persen 50 persen	100,00%	26.904.784	18.097.400	67,26%	
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capai Kinerja Fisik			Capaian Kinerja Keuangan			
			Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)	
3	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah asistensi hubungan industrial yang dilaksanakan	10 perusahaan	19 Perusahaan	100,00%	11.661.824	7.909.150	67,82%	
4	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak	Persentase kasus hubungan industrial yang ditangani	100 persen	100 persen	100,00%	15.242.960	10.188.250	66,84%	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DPMPTSPPTK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022

	pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	BB		102,50%	9.120.757.678	8.494.466.742	93,13%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja	100 persen	100 persen	100,00%	19.779.000	19.108.200	96,61%	
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	19.779.000	19.108.200	96,61%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN Tepat Waktu	100 persen	100 persen	100,00%	6.766.531.902	6.361.384.962	94,01%	
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan Tunjangan	57 orang	57 orang	100,00%	6.766.531.902	6.361.384.962	94,01%	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengamanan barang milik daerah	100 persen	100 persen	100,00%	286.306.236	284.517.720	99,38%	
7	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah pelaksanaan pengamanan kantor Jumlah tenaga kontrak pengamanan kantor	12 bulan 9 orang	12 bulan 9 orang	100,00%	286.306.236	284.517.720	99,38%	
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capai Kinerja Fisik			Capaian Kinerja Keuangan			Ket
			Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	120,00%	433.502.600	404.426.558	93,29%	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DPMPTSPPTK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022

8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis peralatan listrik yang dibeli	45 jenis	45 jenis	100,00%	5.523.500	5.523.500	100,00%	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan	5 jenis	5 jenis	100,00%	123.676.000	122.632.800	99,16%	
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis alat tulis yang dibeli	46 jenis	46 jenis	100,00%	22.833.100	22.745.220	99,62%	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen yang dicetak Jumlah dokumen yang digandakan Jumlah Dokumen yang dijilid	7 Jenis 300.050 lembar 90 Buah	7 Jenis 300.050 lembar 90 Buah	100,00%	22.132.000	20.934.740	94,59%	
12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu yang difasilitasi Jumlah penyediaan makanan minuman tamu	200 porsi 12 bulan	porsi 12 bulan	100,00%	10.138.000	6.832.100	67,39%	realisasi keuangan menyesuaikan dengan volume kunjungan tamu
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan rapat yang dihadiri	100 persen	100 persen	100,00%	249.200.000	225.758.198	90,59%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas roda 2	100 persen	100 persen	100,00%	75.000.000	74.426.700	99,24%	
14	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 2	3 unit	3 unit	100,00%	75.000.000	74.426.700	99,24%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	97,50%	968.850.000	807.360.564	83,33%	
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa pengiriman Paket Jumlah Buku Cek Jumlah Materai	12 Bulan 4 Bulan 300 buah	199 buah	95,00%	3.050.000	1.990.000	65,25%	realisasi keuangan menyesuaikan dengan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DPMPTSPPTK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022

									jumlah surat yang dikirim
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capai Kinerja Fisik			Capaian Kinerja Keuangan			Ket
			Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)	
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air yang dibayar Jumlah rekening internet yang dibayar Jumlah Rekening Listrik yang dibayar Jumlah Rekening Telepon yang dibayar	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	10 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	100,00%	965.800.000	805.370.564	83,39%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang Milik Daerah	100 persen	100 persen	100,00%	570.787.940	543.242.038	95,17%	
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Esselon 2 terpelihara	1 unit	1 unit	100,00%	39.190.000	27.775.225	70,87%	realisasi keuangan sesuai kebutuhan pemeliharaan kendaraan Dinas jabatan
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Roda 2 terpelihara Jumlah kendaraan roda 4 terpelihara	14 unit 6 unit	14 unit 6 unit	100,00%	173.900.000	160.088.888	92,06%	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DPMPTSPPTK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022

19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa perbaikan peralatan kantor	12 bulan	12 bulan	100,00%	4.000.000	3.935.000	98,38%	
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara Jumlah tenaga kontrak kebersihan	1 unit 10 orang	1 unit 10 orang	100,00%	353.697.940	351.442.925	99,36%	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase kemudahan berusaha	100 persen	100 persen	100,00%	238.176.000	217.016.605	91,12%	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan regulasi penanaman modal	100 persen	100 persen	100,00%	238.176.000	217.016.605	91,12%	
21	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen insentif penanaman modal Jumlah dokumen Perda Penanaman Modal	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100,00%	238.176.000	217.016.605	91,12%	
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capai Kinerja Fisik			Capaian Kinerja Keuangan			Ket
			Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)	
6	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi Hijau	45 Milyar Rupiah	45 Milyar Rupiah	100,00%	183.494.000	178.892.290	97,49%	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan media dan sarana Promosi Persentase penambahan jumlah Investor	50 Persen 7 Persen	50 Persen 533 % (Jumlah Pelaku Usaha 5324 Usaha	100,00%	183.494.000	178.892.290	97,49%	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DPMPTSPPTK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022

				dengan nilai 1,389 T)					
22	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi promosi Penanaman Modal Jumlah Layanan Informasi Penanaman Modal	1 Dokumen 1 Layanan Simota	1 Dokumen 1 Layanan Simota	100,00%	116.229.000	112.796.490	97,05%	
23	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Investasi yang diikuti Jumlah Temu kemitraan yang dilaksanakan Media Informasi Penanaman Modal	1 Eveb 1 Pertemuan 1 Paket	1 Eveb 1 Pertemuan 1 Paket	100,00%	67.265.000	66.095.800	98,26%	
7	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase unsur pelayanan berkategori baik	75 persen	75 persen	100,00%	986.668.168	902.601.330	91,48%	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Standar Pelayanan Perizinan yang diterbitkan	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	986.668.168	902.601.330	91,48%	
24	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Aplikasi yang dikelola Jumlah izin yang diterbitkan Persentase jumlah izin yang diproses	3 Aplikasi 3700 izin 100 persen	3 Aplikasi 7735 izin 100 persen	100,00%	908.958.668	836.002.227	91,97%	
25	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Penyusunan Draft Standar Pelayanan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	38.389.500	32.499.339	84,66%	
26	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu	Persentase pengaduan perizinan yang ditangani	100 persen	100 persen (6 Pengaduan)	100,00%	39.320.000	34.099.764	86,72%	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DPMPTSPPTK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022

	Perizinan dan Non Perizinan								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capai Kinerja Fisik			Capaian Kinerja Keuangan			
			Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)	
8	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian LKPM yang dilaksanakan	50 persen	100 persen	95,00%	403.823.443	289.574.840	71,71%	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian LKPM yang dilaksanakan	50 persen	100 persen	95,00%	403.823.443	289.574.840	71,71%	
27	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan Realisasi Investasi Laporan Rencana Investasi Tenaga Ahli Admin LKPM dan Pendamping OSS	1 Dokumen 1 Dokumen 12 Bulan	1 Dokumen 1 Dokumen 12 Bulan	95,00%	43.607.451	32.322.000	74,12%	Sisa anggaran adalah belanja Tenaga Administrasi (alasan efisiesi)
28	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pengawasan pelaksanaan penanaman Modal Jumlah Peserta Sosialisasi Penyelesaian Permasalahan Perusahaan	14 Pelaku Usaha 217 Pelaku Usaha 8 Perusahaan	14 Pelaku Usaha 257 Pelaku Usaha 0 perusahaan (tidak adanya laporan permasalahan perusahaan)	95,00%	360.215.992	257.252.840	71,42%	Sisa anggaran adalah belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, honorarium narsum,

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DPMPTSPPTK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022

									penyuluh , jasa tenaga administrasi dan SPPD (alasan Efisiensi)
9	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data Informasi perizinan secara online	100 persen		100,00%	17.864.000	16.993.800	95,13%	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Data Perizinan Persentase laporan dan Informasi perizinan tepat waktu	12 Laporan 100 persen	12 Laporan 100 persen	100,00%	17.864.000	16.993.800	95,13%	
29	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Berkas perizinan yang divalidasi Jumlah laporan data perizinan Persentase informasi perizinan yang diterbitkan	2000 Berkas 12 laporan 100 persen	2153 Berkas 12 laporan 100 persen	100,00%	17.864.000	16.993.800	95,13%	
10	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan Pembinaan Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM)	50 persen 2 Persen	50 persen 2 Persen	100,00%	884.593.804	717.378.613	81,10%	
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capai Kinerja Fisik			Capaian Kinerja Keuangan			Ket
			Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DPMPTSPPTK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022

	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang menerapkan Standarisasi Produk Jumlah IKM yang menerapkan teknologi tepat guna Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen	100 IKM 150 IKM 150 IKM	100 IKM 150 IKM 150 IKM	100,00%	884.593.804	717.378.613	81,10%	
30	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang difasilitasi sertifikat halal Jumlah Peserta fasilitasi pendaftaran Merk Jumlah Peserta Sosialisasi P3DN Jumlah Tenaga Kontrak Penyuluh Industri	40 IKM 20 Orang 145 Orang 1 Orang	57 IKM 24 Orang 145 Orang 1 Orang	100,00%	102.451.804	91.188.421	89,01%	
31	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Pameran dan Promosi yang diikuti Jumlah Peserta Magang Membatik Jumlah Peserta Pelatihan Membatik Jumlah Peserta Pelatihan Sulam	2 Even 20 Orang 20 Orang 15 Orang	2 Even 20 Orang 20 Orang 15 Orang	100,00%	782.142.000	626.190.192	80,06%	
11	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaan	50 persen	50 persen	100,00%	54.111.800	44.357.100	81,97%	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan data dan Informasi Industri	75 Persen	75 Persen	100,00%	54.111.800	44.357.100	81,97%	
32	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen data IKM Jumlah Peserta Sosialisasi Siinas Jumlah Video Promosi I ndustri	1 Dokumen 150 orang 3 Video	1 Dokumen 150 orang 3 Video	100,00%	54.111.800	44.357.100	81,97%	
	UPTD KERAJINAN INDUSTRI								

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DPMPTSPPTK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	100 persen		100,00%	1.805.400	1.523.000	84,36%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis alat kebersihan yang diadakan	14 jenis		100,00%	1.805.400	1.523.000	84,36%	
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capai Kinerja Fisik			Capaian Kinerja Keuangan			Ket
			Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)	
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jenis alat kebersihan yang dibeli	8 jenis	8 jenis	100,00%	1.805.400	1.523.000	84,36%	
2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaan Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM)	50 Persen 2 Persen		100,00%	549.218.916	533.775.830	97,19%	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang menerapkan standarisasi produk Jumlah IKM yang menerapkan teknologi tepat guna Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen	100 IKM 150 IKM 150 IKM		100,00%	549.218.916	533.775.830	97,19%	
34	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah kerajinan industri yang dipelihara Jumlah Gedung UPTD yang dikelola Jumlah Organisasi mitra Industri yang difasilitasi	1 unit 1 Unit 1 Organisasi	1 unit 1 Unit 1 Organisasi	100,00%	549.218.916	533.775.830	97,19%	
	JUMLAH				99,81%	6.361.425.691	5.583.822.249	90,99%	

- 1) Sub Kegiatan Proses pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan kluster kompetensi. Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan yang ditargetkan 16 orang, terealisasi 16 orang, jumlah peserta pelatihan kuliner yang ditargetkan 20 orang terealisasi 20 orang, jumlah peserta pelatihan menjahit yang ditargetkan 16 orang terealisasi 16 orang dan jumlah peserta pelatihan perbengkelan yang ditargetkan 16 orang dan terealisasi sebanyak 16 orang, untuk capaian kinerja terealisasi 100%, dan alokasi dana sebesar Rp. 652.160.100,- tereliasasi Rp. 522.466.461,- dengan persentase realisasi keuangan 80,11%.
- 2) Sub kegiatan pelayanan antar kerja. Indikator kinerja nya adalah Jumlah laporan pencari kerja, dengan target 12 laporan pencari kerja yang telah terealisasi seluruhnya sebanyak 12 laporan, jumlah lowongan kerja yang tersedia dengan target sebanyak 5 perusahaan terealisasi 5 perusahaan, dan jumlah pencari kerja terdaftar dengan target 20 orang terealisasi 903 orang. dengan capaian kinerja 100%, anggaran Rp. 8.379.500,- terealisasi Rp. 8.063.200,- dengan persentase realisasi keuangan 96,23%
- 3) Sub kegiatan pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat /berdampak pada kepentingan di 1(satu) daerah Kabupaten/Kota, Indikator kinerja jumlah asistensi hubungan industrial yang dilaksanakan, ditargetkan 10 perusahaan, terealisasi 19 perusahaan dengan anggaran Rp. 11.661.824 terealisasi Rp. 7.909.150,- sehingga kinerja keuangan 67,82%
- 4) Sub kegiatan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, indikator kinerja Persentase kasus hubungan industrial yang ditangani telah terealisasi 100%, dengan anggaran 15.242.960,- dapat direalisasikan Rp. 10.188.250,- dengan capaian kinerja keuangan 80%
- 5) Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah, indikator kinerja jumlah dokumen perencanaan yang disusun, dengan target 2 dokumen telah terealisasi 100% sebanyak 2 dokumen dengan anggaran Rp. 19.779.000,- terealisasi Rp. 19.108.200,- sehingga kinerja keuangannya mencapai 96,61%

- 6) Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan dengan indikator kinerja Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan Tunjangan ditargetkan sebanyak
- 7) 57 orang telah direalisasikan 100%, dengan Anggaran Rp. 6.766.531.902,- telah direalisasikan Rp. 6.361.384.962,- kinerja keuangan 94,01%.
- 8) Sub kegiatan Pengamanan Barang milik daerah, dengan indikator kinerja jumlah pelaksanaan pengamanan kantor yang ditargetkan sebanyak 12 orang telah terealisasikan 12 bulan dan jumlah tenaga kontrak pengamanan kantor yang ditargetkan sebanyak 9 orang telah dapat direalisasikan 9 orang dengan jumlah anggaran Rp. 286.306.236,- telah direalisasikan Rp. 284.517.720,- dengan tingkat realisasi keuangan 99,38%
- 9) Sub kegiatan penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor dengan indikator jenis peralatan listrik yang diadakan ditargetkan sebanyak 45 jenis telah tersedia sebanyak 12 jenis, dengan anggaran Rp. 5.523.500,- terealisasi Rp. 5.523.500,- dengan tingkat realisasi 100%
- 10) Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan indikator jenis peralatan kantor yang diadakan ditargetkan sebanyak 5 jenis telah terealisasi sebanyak 5 jenis, dengan anggaran Rp. 123.676.000,- terealisasi Rp. 122.632.800,- dengan capaian kinerja 99,16%
- 11) Sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor, dengan indikator jenis alat tulis yang dibeli ditargetkan 46 jenis telah terealisasi seluruhnya 46 jenis, dengan anggaran Rp. 22.833.100,- telah terealisasi Rp. 22.745.220,- sehingga realisasi keuangan 99,62%
- 12) Sub kegiatan penyediaan barang cetak dan penggandaan, indikator kinerja jenis barang yang

dicetak ditargetkan 6 jenis, terealisasi 6 jenis. Jumlah dokumen yang digandakan ditargetkan sebanyak 300.050 lembar telah terealisasi 300.050 lembar, jumlah dokumen yang dijilid ditargetkan sebanyak 90 buah telah terealisasi 190 buah

- 13) Sub kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu, indikator kinerja jumlah makanan minuman tamu yang difasilitasi ditargetkan sebanyak 200 porsi telah terealisasi sebanyak 150 porsi, dan jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu sebanyak 12 bulan terealisasi 12 bulan. dengan anggaran 10.138.000,- terealisasi Rp. 6.832.100,- dengan tingkat realisasi keuangan 67,39%
- 14)
- 15) Sub kegiatan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator Persentase pemenuhan rapat yang dihadiri yang ditargetkan 100% terealisasi 100%, telah terealisasi seluruhnya, dengan Anggaran 249.200.000,- terealisasi Rp. 225.758.198,- sehingga tingkat kinerja keuangan 90,59%.
- 16) Sub kegiatan Pengadaan kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan, dengan indikator Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang ditargetkan sebanyak 3 unit telah terealisasi 100%, anggaran Rp. 75.000.000,- terealisasi Rp. 74.426.700,- dengan persentase keuangan 99,24%
- 17) Sub kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat, dengan indikator Jasa pengiriman paket yang ditargetkan sebanyak 12 bulan, jumlah buku cek dengan target 4 buah, dan jumlah materai target 300 buah, dengan realisasi keuangan 65,25% dari anggaran 3.050.000,- dapat direalisasikan 1.990.000,-
- 18) Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan Listrik dengan indikator jumlah rekening air, listrik, internet, dan telepon yang dibayar yang dibayar, pembayaran rekening air terdapat kekurangan anggaran sehingga hanya dapat dibayarkan 10 bulan. Hal ini terjadi karena kesalahan menghitung kebutuhan tagihan Air setiap bulannya. Dari anggaran sebesar 965.800.000,-

teralisasi 805.370.564,- dengan persentase realisasi keuangan 83,39%.

- 19) Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas jabatan dengan indikator kinerja jumlah kendaraan eselon 2 yang terpelihara sebanyak 1 unit, dengan jumlah anggaran Rp. 39.190.000,- terealisasi Rp. 27.775.225,- dengan realisasi kinerja 70,87%.
- 20) Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan indikator kinerja jumlah kendaraan operasional yang terpelihara sebanyak 6 unit Roda 4 dan 14 unit Roda 2, dengan jumlah anggaran Rp.173.900.000,- terealisasi Rp.160.088.888,- dengan realisasi keuangan 92,06%.
- 21) Sub kegiatan pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya, dengan indikator jasa perbaikan peralatan kantor telah terealisasi sebanyak target selama 12 bulan, dengan anggaran Rp. 4.000.000,- terealisasi Rp. 3.935.000,- sehingga realisasi kinerja keuangan adalah 98,38%.
- 22) Sub kegiatan pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor, dengan indikator jumlah Gedung kantor yang dipelihara sebanyak 1 gedung dan jumlah tenaga kontrak kebersihan target 10 orang, dengan anggaran Rp. 353.697.940,- terealisasi Rp. 351.442.925,- sehingga realisasi kinerja keuangan adalah 99,36%.
- 23) Sub kegiatan Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman modal dengan indikator Jumlah dokumen Insentif penanaman modal dan jumlah dokumen perda penanaman modal, pada tahun ini telah terlaksana sampai dengan draft Perda Kemudahan Investasi, dengan anggaran 238.176.000,- telah terealisasi 217.016.605,- sehingga persentase realisasi keuangan adalah 91,12%
- 24) Sub kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal dengan indikatornya adalah Jumlah Dokumen strategi promosi penanaman

Modal dan Jumlah layanan informasi Penanaman Modal dengan targetnya adalah 1 dokumen dan 1 layanan simota, kedua nya dapat direalisasikan dengan anggaran 116.229.000 terealisasi 112.796.490,- sehingga realisasi keuangan adalah 97,05%

- 25) Sub kegiatan Pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah promosi investasi yang diikuti telah terealisasi sesuai target 1 event, Jumlah temu kemitraan yang dilaksanakan telah terealisasi sesuai target sebanyak 1 pertemuan dan Media informasi Penanaman Modal sebanyak 1 paket.dengan anggaran Rp. 67.265.000,- terealisasi Rp. 66.095.800,- sehingga realisasi keuangan adalah 98,26%
- 26) Sub kegiatan Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik dengan indikator kinerja jumlah aplikasi yang dikelola, jumlah izin yang diterbitkan, persentase izin yang diproses, telah terealisasi sesuai target sebanyak 3 aplikasi, 7.735 izin dan 100%, dengan anggaran Rp. 908.958.668,- terealisasi Rp. 836.002.227,- sehingga realisasi keuangan adalah 91,97%, capaian realisasi pengurusan izin yang melebihi target yang telah ditetapkan ini terjadi karena adanya program bantuan modal bagi pelaku usaha mikro dari kementerian Koperasi dan UKM dengan persyaratan harus mempunyai NIB sehingga terjadi peningkatan jumlah pengurusan izin secara keseluruhan
- 27) Sub kegiatan Pemantauan Pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan Penanaman modal dengan indikator penyusunan draft standar pelayanan, dengan anggaran Rp. 38.389.500,- terealisasi Rp. 32.499.339,- sehingga realisasi keuangan adalah 84,66%
- 28) Sub kegiatan Penyediaan Layanan konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan dengan indikator kinerja persentase pengaduan perizinan yang ditangani telah terealisasi sesuai

target 100%, dengan anggaran Rp. 39.320.000,- terealisasi Rp. 34.099.764,- sehingga realisasi keuangan adalah 86,72%

- 29) Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator kinerja laporan realisasi investasi, laporan rencana investasi dan tenaga ahli admin LKPM dan Pendamping OSS dengan anggaran Rp. 43.607.451,- terealisasi Rp. 32.322.000,- sehingga realisasi keuangan adalah 74,12%
- 30) Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal merupakan kegiatan yang dibiayai oleh anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan indikator kinerja Jumlah pengawasan pelaksanaan PM, Jumlah peserta sosialisasi dan Penyelesaian permasalahan perusahaan dengan anggaran Rp. 360.215.992,- terealisasi Rp. 257.252.840,- sehingga realisasi keuangan adalah 71,42%
- 31) Sub kegiatan Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan indikator kinerja jumlah berkas perizinan yangdivalidasi, jumlah laporan data perizinan dan persentase informasi perizinan yang diterbitkan telah terealisasi sesuai target 2.153 berkas, 12 laporan dan 100% dengan anggaran Rp. 17.864.000,- terealisasi Rp. 16.993.800,- sehingga realisasi keuangan adalah 95,13%
- 32) Sub kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumberdaya industri dengan indikator kinerja Jumlah IKM yang difasilitasi sertifikat Halal sebanyak 40 IKM terealisasi 57 IKM, jumlah peserta fasilitasi pendaftaran Merk sebanyak 20 orang terealisasi 24 orang, jumlah peserta sosialisasi P3DN sebanyak 145 orang terealisasi 145 orang dan jumlah tenaga kontrak penyuluh Industri sebanyak 1 orang terealisasi 1 orang dengan total anggaran Rp. 102.451.804,- terealisasi Rp. 91.188.421,- sehingga realisasi keuangan adalah 89,01%
- 33) Sub kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan

pelaksanaan pembangunan sarana prasarana industri dengan indikator kinerja jumlah pameran dan promosi yang diikuti sebanyak 2 event, jumlah peserta magang membuat sebanyak 20 orang, jumlah peserta pelatihan membuat sebanyak 20 orang dan jumlah peserta pelatihan sulam sebanyak 15 orang dengan anggaran Rp. 782.142.000,- terealisasi Rp. 626.190.192,- sehingga realisasi keuangan adalah 80,06%

- 34) Sub kegiatan Diseminasi Publikasi Data dan Analisis Industri Kabupaten/Kota melalui SIINAS dengan indikator Jumlah Dokumen Data IKM, Jumlah Peserta Sosialisasi SIINAS, Jumlah Video Promosi Industri telah terealisasi sesuai target 1 dokumen, 150 orang dan 3 Video dengan anggaran Rp. 54.111.800,- terealisasi 81,97% Rp. 44.357.100
- 35) Sub kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dengan indikator kinerja Jumlah Kerajinan industry yang dipelihara, jumlah Gedung UPTD yang dikelola dan jumlah Organisasi mitra Industri yang difasilitasi telah terealisasi sebanyak target 1 unit, 1 unit dan 1 organisasi dengan anggaran Rp. 549.218.916,- terealisasi Rp. 533.775.830,- dengan persentase realisasi keuangan 97,19%.
- 36) Sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya (UPTD) dengan indikator kinerja jenis alat kebersihan yang dibeli telah terealisasi sesuai target sebanyak 14 jenis dengan anggaran Rp. 1.805.400,- terealisasi Rp. 1.523.000,- sehingga realisasi keuangan adalah 84,36%

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi Tahun 2022 merupakan cerminan capaian kinerja sasaran, program dan kegiatan tahun 2022 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan LKJIP mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sebagai pengelola urusan penanaman modal, perindustrian dan tenaga kerja, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam urusan penanaman modal bidang perizinan pelayanan terpadu satu pintu, pengembangan perindustrian dan pelayanan serta penempatan tenaga kerja di Kota Bukittinggi.

Dengan memperhatikan capaian kinerja di Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi mencapai 98,63% dengan predikat “sangat Tinggi” dan untuk semua kegiatan sudah terealisasi sesuai kebutuhan dan sudah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

4.2 SARAN

Dengan adanya Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan. Sehingga dapat menjadi tolok ukur untuk penyempurnaan dokumen perencanaan dan berbagai kebijakan untuk yang akan datang. Guna mencapai target kinerja sasaran organisasi dan menghadapi berbagai kendala yang dihadapi, berbagai upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain :

1. Perbaikan perencanaan dan estimasi penggunaan anggaran sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Mengikutkan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan baik fungsional maupun yang lainnya dalam menambah pengetahuan dan keahlian pegawai tersebut dalam meningkatkan produktivitas pegawai DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi;
3. Pembaharuan (Updating) sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu sesuai dengan kebutuhan. Mengingat dukungan teknologi informasi sangatlah penting untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu yang memiliki kompleksitas permasalahan yang sangat tinggi sehingga dibutuhkan tingkat kecermatan yang memadai;
4. Memenuhi kebutuhan sarana pendukung Mal Pelayanan Publik, misalnya pengadaan Genset sebagai antisipasi pemadaman listrik bergilir yang dapat terjadi tanpa dapat di prediksi sebelumnya.
5. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi;
6. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset.

Bukittinggi, Januari 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Bukittinggi



Drs. NOVERDI

NIP. 19661116 198602 1 001